

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manajemen laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sektor publik memiliki dampak terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Adanya potensial terjadinya kecurangan (*fraud*) saat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dilaksanakan. Beberapa aspek terkait dengan permasalahan ini dapat diuraikan sebagai berikut: Kepentingan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat yang bergantung pada informasi tersebut untuk memahami alokasi dana publik, dapat terganggu jika terjadi kecurangan dalam laporan keuangan SKPD. Praktik-praktik kecurangan dalam pelaporan, seperti pengelabuan defisit anggaran atau manipulasi angka pendapatan, berpotensi merusak integritas laporan keuangan tersebut dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Selain itu, dimensi akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dari SKPD juga dapat terpengaruh oleh praktik kecurangan dalam laporan keuangan, yang berisiko mengurangi integritas dalam pengelolaan dana publik.

Fraud merupakan suatu yang menyangkut ketidak beres an dan tindakan yang secara bercirikan penipuan yang disengaja yang biasanya disebut dengan korupsi, namun kecurangan (*Fraud*) dan korupsi merupakan hal yang tidak sama. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri, orang lain atau suatu badan perusahaan atau organisasi yang dilakukan untuk melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan suatu pihak. Pada dasarnya terdapat dua jenis

kecurangan di suatu instansi, organisasi atau juga perusahaan. Kecurangan (*Fraud*) tersebut yaitu kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Kecurangan internal merupakan tindakan tidak legal dari karyawan, manager di suatu organisasi sedangkan kecurangan eksternal merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap organisasi.

Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (*Fraud*). Salah satu teori yang menjelaskan tentang unsur penyebab kecurangan atau *Fraud* adalah teori segitiga kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) yang ditemukan oleh Cressy di Tahun 1950 dalam Kurniawan (2014:28). Teori segitiga kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) ini didukung oleh tiga unsur yaitu: Tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Sebagaimana disebutkan oleh Association of Certified Examiners (ACFE) dalam Abdul Halim (2003:140) yang pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Menurut Amin Widjaja (2013) dalam Ananda (2014:11) kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi organisasi atau lembaga itu sendiri. Dalam Kurniawan (2014:66) kecurangan (*fraud*) memiliki tiga kategori diantaranya yaitu: 1) Korupsi (*Corruption*) yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang dimiliki dalam melaksanakan transaksi yang tugasnya kepada organisasi sehingga dapat memperoleh manfaat tertentu. Korupsi merupakan jenis kecurangan

atau *Fraud* yang paling banyak ditemukan di negara berkembang. 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) adalah aktivitas penyalahgunaan, penggelapan atau pencurian asset-aset dan sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau mengelola aset tersebut untuk kepentingan pribadinya. Menurut Tang et al., (2003) dalam Wilopo (2006:4), Perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Ini merupakan kecurangan (*Fraud*) yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur dan dihitung. 3) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*) adalah jenis kecurangan (*Fraud*) yang sering dilakukan oleh manajemen tingkat atas seperti pejabat atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan dan merekayasa laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan.

Banyak terjadi kasus-kasus kecurangan di Indonesia, salah satunya adalah kecurangan pada laporan keuangan. Pada sektor publik kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009:2).

Faktor yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*Fraud*) adalah efektivitas sistem pengendalian internal (*intern control system*). Menurut Mulyadi (2016:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi. Sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of The

Treadway Commission (COSO) dalam Kurniawan (2014:174) merupakan proses yang efektivitas nya dipengaruhi oleh aktivitas pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan yaitu keandalan Pelaporan Keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Fawzi dan Yuyetta (2011) Sistem Pengendalian Internal baik di sektor privat maupun sektor publik mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk pengamanan aset. Tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Pengendalian internal di sektor pemerintah ditunjang dengan adanya regulasi dan aturan-aturan yaitu dengan dibuatnya standar akuntansi pemerintah. Pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Kelima elemen tersebut membantu suatu instansi untuk mencapai tujuannya (Arens, 2008:376). Pengendalian internal harus didukung dengan monitoring untuk memastikan apakah pengendalian internal tersebut berjalan dengan efektif atau tidak. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap kecurangan (*fraud*).

Selain faktor yang telah di uraikan sebelumnya, kesesuaian kompensasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*). Kompensasi biasa juga disebut gaji atau pendapatan dan dapat didefinisikan sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2000:17). Kompensasi juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap *fraud*, seseorang cenderung akan berperilaku curang untuk

memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Dengan kompensasi yang sesuai diharapkan dapat meminimalisir tindakan kecurangan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecurangan di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi kelemahan pada peraturan sering dijadikan alasan oleh pelaku kecurangan untuk mencari pembenaran. Menurut Rahmawati (2012:9) aturan Akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah dibuat untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan. Thoyibatun (2009:6) menyebutkan sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP. Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan kewajiban dalam organisasi karena laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menjadi perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk melacak nya. Hasil penelitian Wilopo (2009:1-49) semakin tinggi ketaatan perusahaan pada aturan akuntansi maka akan semakin rendah Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang dilakukan manajemen pada perusahaan.

Ada juga faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan (*Fraud*) yakni etika kepemimpinan, Menurut Griffin dan Ronald (2007:58) menyatakan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang

diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan. Etika kepemimpinan juga merupakan nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin seperti etika, kesopanan, bagaimana leader memperlakukan karyawannya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan (*Fraud*) adalah kesesuaian kompensasi, kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh seseorang berupa uang maupun barang, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu upaya manajemen. Kecenderungan kecurangan (*Fraud*) terjadi ketika seseorang mengalami tekanan. Tekanan biasanya dapat terjadi ketika kebutuhan hidup tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Seseorang diharapkan mendapatkan kepuasan dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengurangi kasus kecurangan (*Fraud*).

World Bank dalam Kurniawan (2014:134) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu proses penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam penyelenggaraan *good governance*. Legal and political framework yang berarti penciptaan undang - undang yang menjadi pacuan aturan di dalam sebuah usaha dan kebijakan yang mendukung dan juga mendorong aktivitas usaha sehingga perekonomian menjadi lebih kondusif. Berdasarkan buku kewarganegaraan & masyarakat madani (2019) karya Heri Herdiawanto pada tiga prinsip dasar tersebut yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Transparansi menyangkut menuntut adanya kebebasan aliran informasi publik, Partisipasi berkaitan proses pembuatan keputusan dan Akuntabilitas berkaitan pengambilan keputusan harus mempertanggungjawabkan

keputusan yang telah dibuatnya ke publik. Ketiga prinsip *good governance* diterapkan secara optimal agar dapat meminimalisir adanya peluang terjadinya kecurangan (*Fraud*).

Mengingat adanya kelemahan tentang kecurangan yang sering terjadi di Indonesia, penelitian ini bermaksud untuk menggali persepsi para pegawai di bagian Akuntansi atau Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan untuk bisa mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal, etika kepemimpinan, ketaatan terhadap aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi, serta implementasi *good governance* terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*Fraud*). Peneliti mengambil Kabupaten Tabanan untuk Penelitian ini dikarenakan aksesnya yang dapat dicapai dengan mudah sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lancar dan lokasi Peneliti sudah cukup strategis untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan?
2. Apakah etika kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan?

4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan?
5. Apakah implementasi *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh etika kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh persepsi kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabanan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait di dalamnya, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi serta menambah wawasan mengenai kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

2) Bagi Universitas/ Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan ilmiah, untuk bacaan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kecurangan (*Fraud*).

3) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan-masukan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan kecurangan (*Fraud*) Akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle* sebagai dasar teori utama. Berdasarkan yang ditemukan oleh Cressey (1950) teori Segitiga *Fraud (Fraud Triangle Theory)* ini didukung tiga unsur yaitu:

2.1.1.1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan situasi dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral. Tekanan mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasi nya untuk melakukan kecurangan (Arens, et al., 2012:375).

Tekanan dikaitkan dengan variabel ini adalah variabel kesesuaian kompensasi dan etika kepemimpinan. Kompensasi adalah bentuk balas jasa dari sebuah organisasi terhadap karyawan atau bawahan yang bersifat financial dan nonfinancial. Cara men sejahterakan karyawan atau bawahan di lingkungan kerja adalah dengan cara keadilan organisasi, keadilan ini berkaitan dengan reward berupa gaji, gift atas pekerjaannya agar tidak ada munculnya kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Etika Kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang memberi contoh, perilaku dalam mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin

harus memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, tidak hanya itu seorang pemimpin harus menyamaratakan seluruh karyawannya agar tidak terjadi perselisihan atau iri dengki sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan sesuai yang diinginkan.

2.1.1.2. Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang merupakan situasi dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan (Arens, et al., 2012:375).

Kesempatan dikaitkan dengan penelitian ini adalah variabel efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi. Efektivitas pengendalian internal adalah proses kebijakan prosedur yang harus ditaati dalam proses operasional organisasi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan nilai-nilai atau aturan yang dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika dalam organisasi sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi lemah maka akan timbul kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Ketika seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian dan mengetahui lemahnya pengawasan aturan yang berlaku dalam organisasi yang memperkenalkan dilakukannya skema kecurangan jabatan, tanggung jawab dan memberikan peluang terlaksananya kecurangan.

2.1.1.3. Pembenaaran (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaaran atas perbuatannya, namun alasan tersebut tidak tepat. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *Fraud Triangle* yang paling sulit untuk diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, akan lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki standar moral yang tinggi (Arens, et al., 2012:375).

Unsur ini merupakan bagian yang paling sulit untuk diukur, yang berkaitan dengan ini adalah variabel etika kepemimpinan, ketaatan aturan akuntansi dan *good governance*. *Good Governance* merupakan pengelolaan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Masing-masing variabel mempunyai pembenaaran tentang perasaan rasa bersalah dalam melakukan kecurangan (*Fraud*). Pelaku *Fraud* beranggapan bahwa perbuatan seperti ini tidak melukai siapapun termasuk pada perusahaan maupun masyarakat dan hal ini hanya merupakan masalah yang kecil, ini akan memudahkan terjadinya kecenderungan kecurangan (*Fraud*) di lingkungan perusahaan. Efektivitas pengendalian internal, etika kepemimpinan, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi, dan *good governance* dapat menjadi unsur kecurangan (*Fraud*).

2.1.2. kecurangan (*Fraud*)

2.1.2.1. Pengertian kecurangan (*Fraud*)

Definisi ilegal kecurangan/ *Fraud* dalam Tuanakotta (2014) adalah setiap tindakan yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan Penipuan yang dilakukan fisik. oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) menyebutkan bahwa *Fraud* segala tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan atau pelanggaran untuk mendapatkan uang, asset, menghindari pembayaran maupun menghindari kerugian untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan The Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) mendefinisikan *Fraud* sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memanipulasi dan memberikan laporan yang salah kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung. Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji penghilangan secara sengaja atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk membohongi pemakai laporan keuangan.
- 2) Salah saji yang timbul dari penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aktiva yang sering di sebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan yang

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan dengan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*Fraud*) merupakan kecurangan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dalam maupun luar organisasi yang secara langsung merugikan pihak yang lain.

2.1.2.2. Jenis- jenis Kecurangan

Kecurangan dapat diklasifikasikan berbagai cara *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mempunyai tiga kategori yaitu:

1) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dilakukan dengan cara menyalah gunakan di dalam melaksanakan transaksi kepada organisasi sehingga dapat memperoleh manfaat tertentu. Korupsi (*Corruption*) biasanya dilakukan melalui kerja sama antara seorang di dalam organisasi dengan orang luar perusahaan atau organisasi. Berdasarkan *Fraud Tree*, *corruption schemes* mempunyai empat kategori yaitu konflik kepentingan, pemerasan ekonomi, penerimaan illegal dan gratifikasi.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation atau penyalahgunaan aset yaitu aktivitas penyalahgunaan, penggelapan aset atau sumber daya yang dimiliki organisasi yang dilakukan oleh seseorang yang mengelola aset tersebut untuk kepentingan pribadi. Biasanya penyalahgunaan aset terjadi pada kas dan persediaan.

2.1.2.3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent Statement atau kecurangan laporan keuangan adalah jenis kecurangan yang sering dilakukan organisasi terhadap laporan keuangan. ACFE membagi jenis *Fraud* ini menjadi dua yaitu financial dan nonfinancial. Kelompok *Fraud* terhadap laporan keuangan misalnya:

- 1) Memalsukan bukti transaksi.
- 2) Mengakui suatu transaksi yang jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
- 3) Membuat atau menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
- 4) Menerapkan pengakuan aset sedemikian rupa sehingga asset menjadi lebih besar dengan yang seharusnya.

2.1.3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

2.1.3.1. Pengertian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi nya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai.

menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan

memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSSO) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses efektivitas nya dipengaruhi oleh aktivitas organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan-tujuan berikut:

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku

Dapat disimpulkan pengendalian internal adalah proses atas kebijakan dan prosedur yang harus ditaati dalam proses operasional organisasi atau perusahaan agar keyakinan tercapainya tujuan organisasi tersebut.

2.1.3.2. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Konsep pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway* (COSO) tersebut diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan beberapa perubahan. Hasilnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Tujuan dilaksanakannya SPIP di lingkungan pemerintah agar tercapainya tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP SPIP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, terdapat lima unsur SPIP yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian yaitu kondisi di dalam suatu organisasi pemerintah yang akan mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena berpengaruh pada seberapa bagus atau baik tingkat kesadaran masing-masing dalam instansi pemerintah.
- b. Penilaian resiko yaitu proses identifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian organisasi dan juga melakukan analisis terhadap resiko tersebut. Unsur penilaian resiko mempunyai dua tahap yang pertama adalah tahap pelaksanaan survey ke seluruh bagian dalam instansi pemerintah dengan melakukan wawancara bersama seluruh aparat pemerintah untuk meminimalisir resiko. Tahap kedua yaitu melakukan analisis resiko terhadap resiko yang telah diidentifikasi berupa penentuan dampak risiko dan probabilitas terjadinya risiko.
- c. Aktivitas pengendalian adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko yang sudah diidentifikasi atau dianalisis pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat dari fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
- d. Informasi dan komunikasi adalah informasi data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam instansi pemerintah. Informasi tersebut harus diperoleh dan didistribusikan kepada pemimpin atau pegawai dalam waktu yang tepat. Komunikasi adalah penyampaian pesan dan informasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan feedback. Komunikasi dikatakan lebih efektif apabila kesamaan pemahaman antara pihak pemberi informasi dengan pihak yang menerima pesan atau informasi.

- e. Pemantauan pengendalian intern yaitu pengawasan yang dilakukan manajemen untuk menilai kualitas pengendalian intern. Pemantauan dilakukan agar memastikan bahwa pengendalian intern telah berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan dan diharapkan. Pemantauan pengendalian intern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut.

2.1.4. Etika Kepemimpinan

Menurut Sutrisno (2016:218) “Kepemimpinan ialah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Sedangkan menurut Fahmi (2016:122), “Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan”

Etika kepemimpinan adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik dan buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Etika juga akan menuntut pemimpin untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma kepantasan dalam hubungan sosial. Ciri-ciri etika kepemimpinan yaitu bermartabat dan penuh moral, melayani orang lain. Berkeadilan, jujur, menggunakan nilai sebagai landasan keputusan, menjadi teladan.

Peran sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah merupakan kebutuhan utama. Perusahaan akan berhasil jika kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya bagus. Sumber daya manusia itu adalah karyawan dan pemimpin. Perusahaan akan berhasil jika

karyawan bagus dalam pekerjaannya dan juga dukungan dan arahan dari seorang pemimpin. Pemimpin memiliki peranan yang penting dalam perusahaan agar perusahaan tersebut sukses seperti yang diharapkan.

Salah satu faktor kepemimpinan dalam perusahaan adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain belum tentu sama karena hal itu bergantung pada sang pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan akan berubah apabila pemimpinnya juga berubah.

Gaya kepemimpinan ialah cara pemimpin memberikan pengaruh atau motivasi kepada karyawan agar karyawan berusaha lebih baik dalam mengerjakan pekerjaannya. Dengan ini pengaruh pemimpin juga memberikan dampak pada perusahaan

2.1.5. Ketaatan Aturan Akuntansi

Organisasi Maupun Individu mempunyai nilai dan aturan dalam menjalankan usahanya. Ketaatan aturan yaitu aturan dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya, organisasi menyampaikan laporan keuangan. Pada dasarnya ada dua alasan perusahaan penyusunan laporan penanggung jawaban keuangan yaitu tuntutan aturan dan tuntutan pasar. Informasi laporan keuangan tidak hanya diperlakukan oleh pihak internal perusahaan tetapi juga pihak eksternal perusahaan.

Untuk menyeragamkan laporan keuangan sehingga sepaham informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, maka dari itu pemerintah menyusun standar yang berlaku umum

dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Indonesia, disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar Akuntansi yang berlaku di organisasi non publik adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar bagi organisasi sektor public adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Prinsip Akuntansi yang berlaku saat ini adalah Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Menurut Suwardjono menyebutkan bahwa Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) merupakan kerangka pedoman yang terdiri atas standar sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi. Prinsip Akuntansi adalah ideologi, gagasan, asumsi, konsep, kaidah prosedur, metode dan teknik akuntansi yang teoritis maupun praktis.

Standar Akuntansi untuk pemerintah di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No 71 Tahun 2010. Dalam PP No 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang serta pendapatan, belanja dan biaya dalam pelaporan pelaksanaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Ketaatan terhadap aturan akuntansi, selain untuk mempermudah pemeriksaan juga mampu mengurangi kecenderungan, Wolk and Tierney dalam Rahmawati (2012) menyebutkan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh auditor.

2.1.6. Persepsi Kesesuaian Kompensasi

2.1.6.1. Pengertian Kompensasi

Menurut (Mulyadi, 2015) Kompensasi adalah setiap bentuk yang diberikan kepada seluruh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut Enny (2019:37) kompensasi dapat didefinisikan sebagai bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka kepada organisasi. Kompensasi tersebut dapat berupa finansial yang langsung maupun tidak langsung, serta penghargaan tersebut dapat pula bersifat tidak langsung

2.1.6.2. Tujuan Pemberian Kompensasi

Secara umum tujuan pemberian kompensasi menurut (Siagian, 2013) adalah:

- a) Kesejahteraan Karyawan, dimana perusahaan bila memperhatikan karyawan dalam pemberian kompensasi dalam penetapan gaji minimum peraturan tentang ketenagakerjaan.
- b) Memotivasi Karyawan, dimana perusahaan membuat ketentuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan yang tinggi sehingga akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan hasil kerja.
- c) Peningkatan Produktivitas, dimana dengan peningkatan pemberian kompensasi terhadap karyawan maka akan memotivasi dan juga akan meningkatkan produktivitas karyawan.

- d) Mempertahankan karyawan yang berprestasi, dimana dengan memberikan kompensasi yang tinggi maka tingkat keluar masuk karyawan bisa ditekan. Terutama bagi karyawan yang berprestasi.

2.1.6.3. Jenis-jenis kompensasi

- a) Gaji, merupakan sebuah imbalan yang berbentuk financial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur baik harian, mingguan atau bulanan.
- b) Upah, merupakan imbalan finansial secara langsung yang dibayarkan kepada seorang karyawan yang disesuaikan dengan jam kerjanya, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang dihasilkan jika suatu perusahaan jasa.
- c) Bonus, kompensasi langsung yang berbentuk langsung tidak dikaitkan dengan gaji atau upah dan pemberiannya berdasarkan keuntungan perusahaan, dan juga pemberian bonus akan diatur oleh pimpinan perusahaan, biasanya disesuaikan dengan jabatan.
- d) Tunjangan Hari Raya (THR) adalah sebuah kompensasi finansial yang diberikan kepada karyawan secara langsung dan berdasarkan peraturan pemerintah organisasi perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya, dasar pemberian THR tersebut adalah peraturan pemerintah bukan karena keberuntungan perusahaan.
- e) Insentif adalah sebuah imbalan secara langsung kepada karyawan karena kinerja karyawan tersebut melebihi standar yang ditentukan oleh pimpinan dan pemberian insentif tersebut tidak dipengaruhi gaji atau upah.
- f) Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan

dalam meningkatkan kesejahteraan para karyawan, contohnya adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, bantuan perumahan, dll.

2.1.6.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi menurut (Mulyadi, 2015) adalah sebagai berikut;

- a) Penawaran dan permintaan, bahwa penawaran dan permintaan tenaga kerja akan mempengaruhi kompensasi. Jika penawaran jumlah kerja itu sangat kurang maka gaji yang diminta akan tinggi. Sebaliknya jika permintaan tenaga kerja itu berkurang maka kesempatan kerja menjadi langka, maka gaji akan rendah.
- b) Serikat pekerja, suatu perusahaan jika sudah terbentuk serikat pekerja maka serikat tersebut juga memiliki peran dalam menentukan kompensasi. Jika serikat pekerjanya memiliki kedudukan yang kuat maka kedudukan bagi karyawan juga akan kuat dalam menentukan kebijaksanaan kompensasi.
- c) Kemampuan untuk membayar, kompensasi juga merupakan komponen biaya produksi. Maka harga pokok juga akan besar, oleh karena itu kemampuan perusahaan untuk membayar kompensasi atau gaji perusahaan tergantung dari usaha dan nama baik perusahaan.
- d) Produktivitas, jika gaji yang diberikan kepada karyawan tinggi dan disesuaikan dengan produktivitas, maka bagi karyawan yang berprestasi semakin meningkat, maka akan semakin tinggi gaji yang akan diterima.

2.1.7. Implementasi *Good Governance*

2.1.7.1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Hamdani (2016:20) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. The Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham GCG dimaksudkan untuk menjamin sustainability

Good Governance atau tata kelola yang baik adalah suatu hal yang sangat penting bagi suatu Negara. Melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik maka nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta terciptanya pelaksanaan tugas yang dilakukan masing-masing lembaga dan instansi pemerintah yang efektif dan efisien

Definisi *Good Governance* menurut *United Nations Developments Program* (UNDP) ialah pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi untuk semua urusan Negara pada semua tingkatan dan metode untuk meningkatkan koneksi sosial, disintegrasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7.2. Karakteristik *Good Governance*

United Nations Developments Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* yaitu sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Setiap warga negara berhak memiliki suara di dalam proses pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi dapat diciptakan melalui kebebasan berbicara dan bernegosiasi serta adanya masyarakat umum yang terorganisir.

b) Penegakan aturan hukum dengan adil dan tidak memihak salah satu golongan

Membuat kerangka penegakan hukum yang mampu menjamin penegakan hukum yang telah dilakukan secara adil.

c) Transparansi

Karakteristik ini menuntut adanya kebebasan aliran informasi publik. Informasi publik harus dapat diperoleh dengan mudah dan masyarakat mudah melakukan pemantauan terhadap informasi tersebut. Agar informasi publik dapat diperoleh dengan mudah maka informasi tersebut harus disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

d) Kecepatan Respon dalam pelayanan kepada *Stakeholders*

Lembaga negara harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat. Oleh karena itu organisasi publik harus dapat melayani semua *stakeholders* dalam jangka waktu yang dapat diterima.

e) Berorientasi Konsensus

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi penengah dan juga menjadi sarana untuk mediasi diantara masing-masing kelompok sehingga dapat dicapai consensus yang terbaik, yang bisa memenuhi apa yang menjadi kepentingan terbaik seluruh masyarakat.

f) Persamaan hak dan kesempatan

Semua warga Negara, termasuk pihak minoritas memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan merdeka.

g) Efektivitas dan Efisiensi

Semua proses yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung makna setiap proses yang dilakukan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang baik tanpa adanya pemborosan terhadap sumber daya tersebut.

h) Akuntabilitas

Pengambil keputusan harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang telah dibuatnya kepada publik.

i) Visi Strategis

Pengambil keputusan atau kebijakan harus memiliki visi strategis yang luas dan bersifat jangka panjang, mengenai pelanggaran pemerintah yang baik.

2.1.7.3. Tujuan Penerapan *Good Governance*

Tujuan *Good Governance* agar perusahaan dapat menjalankan praktik usaha yang sehat, kegiatan yang terjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan juga tujuan sosial ekonomi perusahaan. Menurut Ratnayani (2014) dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/2008 tentang pedoman umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *Good Governance* adalah:

- a) Birokrasi yang bersih, merupakan sistem birokrasi dimana aparatnya bekerja dengan atas dasar aturan dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan seperti korupsi.
- b) Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan baik.
- c) Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak dengan tetap memperhatikan perlindungan dan golongan rahasia Negara.
- d) Birokrasi yang melayani masyarakat adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan layanan yang prima kepada publik.
- e) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Orientasi *Good Governance* adalah pada proses, sistem, dalam kerangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan ekonomi dan tujuan sosial.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Parasmita (2017) yang berjudul Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan Tenaga Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan variabel

dependen yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan variabel independen yaitu Keefektifan pengendalian internal dan kepuasan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepuasan Kerja berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rita Saftarini (2015) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap kecenderungan *Fraud* Akuntansi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Bangli). Dengan menggunakan variabel dependent Kecenderungan *Fraud* dan variabel independen yaitu Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan implementasi *Good Governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap *Fraud*, Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *Fraud*, Implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Fraud*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizky Zaenal (2017) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang). Dengan menggunakan variabel dependent Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan variabel independen yaitu Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi, Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Untuk melihat lebih jelas perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Keterangan	Penelitian Sebelumnya			Peneliti Sekarang
1	Nama Peneliti/ Tahun	Amanda Parasmita (2017)	Rita Saftarani (2018)	Rizki Zaenal (2017)	Ni Putu Ayu Mutiara Pradya Paramitha (2019)
2	Judul Penelitian	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (<i>fraud</i>) Akuntansi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta Kota Padang)	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Etika Kepemimpinan, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i> Pada SKPD di Kabupaten Tabanan.
3	Variabel Penelitian	Variabel Dependen yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,	Variabel Dependen yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,	Variabel Dependen yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Variabel Dependen yaitu Kecenderungan <i>Fraud</i> , Variabel Independen yaitu

		Variabel Independen yaitu Efektivitas Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja.	Variabel Independen yaitu Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> .	(<i>fraud</i>), Variabel Independen yaitu Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi.	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Etika Kepemimpinan, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Implementasi <i>Good Governance</i> .
4	Teknik Analisis Data	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda
5	Hasil Penelitian	Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.	Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> , Implementasi <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> , Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap <i>fraud</i> .	Efektivitas Pengendalian Intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.	Masih diteliti